

## **UPAYA DALAM MENGURANGI KESENJANGAN DIGITAL PADA PENERAPAN *SMART VILLAGE***

### **EFFORTS TO REDUCE THE DIGITAL GAP IN THE IMPLEMENTATION OF *SMART VILLAGE***

**Windy Fadhilah Susanti<sup>1\*</sup>, Khoirunisa Jannatuzzahra<sup>1</sup>, Annisa Dita Putri Kartika<sup>1</sup>, Siti Mukaromah<sup>1</sup>**

\*E-mail: [21082010104@student.upnjatim.ac.id](mailto:21082010104@student.upnjatim.ac.id)

<sup>1</sup>Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN “Veteran” Jawa Timur

#### **Abstrak**

Revolusi industri 5.0 menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di Indonesia pemanfaatan teknologi mengalami kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, dimana tingkat pemanfaatan teknologi dikota lebih besar daripada didesa. Solusi yang dapat ditawarkan untuk menanggulangi ketimpangan tersebut adalah dengan pembangunan *Smart Village*. Namun pembangunan *Smart Village* atau *Smart Village* di Indonesia tidak berjalan optimal dengan salah satu penyebabnya yaitu kesenjangan digital. Maka penelitian ini bertujuan untuk menggali jawaban mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan digital tersebut dalam penerapan *Smart Village*. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan berbagai kajian kepustakaan diantaranya 22 jurnal, 3 buku, dan 6 berita referensi. Dari proses penelitian, dihasilkan bahwa upaya dalam mengurangi kesenjangan digital dalam penerapan *Smart Village* yaitu menumbuhkan literasi digital masyarakat dengan mengadakan program pelatihan TIK kepada masyarakat desa, melakukan pendampingan dan pembinaan mengenai internet sehat dan internet positif, dan pembentukan serta pengembangan Sistem Informasi Desa oleh pemerintah desa.

**Kata kunci:** *kesenjangan digital, Smart Village, literasi digital*

#### **Abstract**

*The industrial revolution 5.0 requires people to adapt to technological developments. In Indonesia, the use of technology have a gap between urban and rural areas, where the level of technology utilization in cities is greater than in villages. The solution that can be offered to overcome this inequality is to build a Smart Village. However, the development of Smart Villages in Indonesia is not running optimally, one of the reasons because the digital divide. So this study aims to explore answers regarding efforts that can be made to reduce the digital divide in implementing Smart Villages. The research used descriptive qualitative methods and data collection was carried out using the literature study method by collecting various literature studies including 22 journals, 3 book, and 6 reference news. From the research process, it resulted that efforts to reduce the digital divide in the implementation of Smart Villages is fostering community digital literacy by holding ICT training programs for village communities, providing assistance and coaching regarding healthy internet and positive internet, and establishing and developing Sistem Informasi Desa by the village government.*

**Keywords:** *digital divide, Smart Village, digital literacy*

### **1. PENDAHULUAN**

Dalam era revolusi industri menuju 5.0, masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus bertumbuh seiring berjalannya waktu. Tanpa disadari,

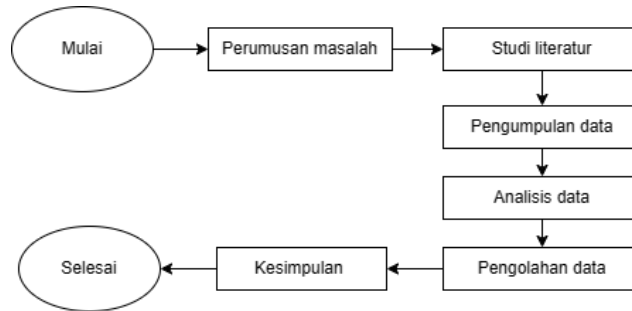
teknologi telah mempengaruhi perubahan ekonomi dan kualitas dari kehidupan masyarakat itu sendiri[1]. Reformasi industri yang terjadi saat ini, membawa Indonesia menjadi negara yang adaptif terhadap transformasi digital. Namun, persebaran pemanfaatan teknologi masih kurang merata ke seluruh wilayah Indonesia terutama pada daerah pedesaan dan daerah 3T. Masih terdapat ketidaksetaraan kemampuan dalam menggunakan teknologi pada era perkembangan digital saat ini yang menciptakan adanya perbedaan di antara masyarakat tertentu. Kurangnya akses, keterbatasan infrastruktur, maupun pemahaman tentang teknologi menjadi kendala utamanya [2]. Bagi masyarakat pedesaan terutama pada daerah desa yang ada di pelosok, internet masih dianggap mahal dan sumber informasi yang didapatkan oleh masyarakat desa masih berasal dari paguyuban yang diadakan sebagai sarana silaturahmi untuk sekedar berbagi informasi[3].

Persebaran teknologi meliputi akses, fasilitas, dan pengetahuan masih mendominasi daerah perkotaan. Perlu adanya upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan digital yang terjadi di daerah pedesaan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan yaitu penerapan *Smart Village*. *Smart Village* merupakan perluasan dari konsep *Smart City*, dimana perbedaan hanya terletak pada lokasi penerapannya saja[4]. *Smart Village* merupakan suatu konsep *Smart Village* untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi [5]. Meskipun banyak daerah pedesaan di Indonesia yang berpotensi untuk menjadi *Smart Village*, konsep *Smart Village* disebut tidak menawarkan solusi untuk semua desa karena kurangnya efisiensi penerapan teknologi yang ditawarkan. Kurang sejahteranya hidup masyarakat di daerah pedesaan mengakibatkan mereka sulit untuk mengakses teknologi yang ada. Padahal yang penting untuk ditekankan pada *Smart Village* adalah bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan teknologi bukan hanya sekedar memperbarui akses digital tersebut[1].

Namun berdasarkan fakta yang ada masih terdapat kemiskinan karena adanya kesenjangan pembangunan yang membuat masyarakat desa tertinggal. Tertinggalnya pembangunan terutama dalam akses teknologi membuat rendahnya literasi digital pada masyarakat desa. Kurangnya literasi digital ini membuat masyarakat desa terutama pada daerah pelosok sulit memahami dan menggunakan teknologi[6]. Inilah yang menyebabkan masyarakat tertinggal kemudian memicu terjadinya kesenjangan digital pada masyarakat pedesaan. Kesenjangan digital didefinisikan sebagai adanya kondisi seseorang yang berbeda terhadap akses digital bukan hanya pada aksesnya namun juga pada keterampilan yang dibutuhkan dalam penggunaan perangkat digital [7]. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat pedesaan di Indonesia kini masih mengalami kesenjangan digital yang cukup tinggi. Padahal seharusnya dalam konsep *Smart Village* yang mengidentifikasi daerah pedesaan sebagai faktor kunci pembangunan [7], haruslah memiliki kesiapan yang matang untuk menghadapi transformasi digital menjadi *Smart Village*.

Namun pada kenyataannya masih ada kesenjangan digital di daerah pedesaan sebagai sebuah tantangan dalam menghadapi *Smart Village* di Indonesia. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan upaya yang terkait mengurangi kesenjangan digital dalam penerapan *Smart Village*.

## 2. METODOLOGI



**Gambar 1. Metodologi Penelitian**

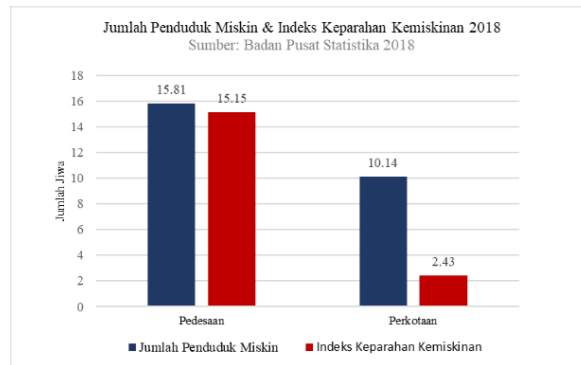
Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini menekankan pada hasil penelitian yang berasal dari analisis, deskripsi, dan evaluasi secara riil guna mendapatkan gambaran yang akurat terhadap permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran mengenai fenomena kesenjangan digital dan data untuk menganalisis upaya dalam mengurangi kesenjangan digital terutama pada penerapan *Smart Village*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur yang dilaksanakan dengan mengumpulkan berbagai kajian kepustakaan yang diperlukan. Dalam artian data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penulis sebelumnya, bukan berasal dari data studi lapangan yang dilakukan secara langsung.

Studi literatur adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui literasi berupa buku, jurnal, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan atau diselesaikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 22 jurnal referensi, 3 buku referensi, dan 6 website terkait. Alur penelitian diawali dengan pencarian topik permasalahan yang ingin dikaji, kemudian pengumpulan data melalui studi literatur yang diperoleh dari jurnal, buku, dan laporan. Studi literatur yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapat data yang relevan terhadap permasalahan, yang kemudian data - data yang diperoleh akan diolah dan diambil untuk menghasilkan sebuah pemecahan atas masalah dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Realitas Penerapan *Smart Village* di Indonesia

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan dan non-makanan atau sebuah keadaan kekurangan dimana tidak dapat menikmati fasilitas seperti pendidikan, dan pelayanan kesehatan secara optimal karena masalah ekonomi. Kemiskinan sendiri dapat dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan. Rata-rata pendapatan dibawah garis kemiskinan pada september 2021 yaitu sebesar Rp 486.168 per kapita[8]. Jika pendapatan masyarakat dibawah rata-rata tersebut maka dikategorikan miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Maret 2018, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82%)[9]. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia yaitu pola pikir masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, dan tingginya tingkat persaingan kerja yang mengakibatkan banyaknya pengangguran [10]. Dari jumlah data kemiskinan diatas, kemiskinan di desa memiliki jumlah lebih banyak dari pada kemiskinan di kota.



**Gambar 2. Diagram penduduk miskin & indeks keparahan kemiskinan 2018**

Dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik September 2018 yang disajikan pada Gambar 2, jumlah penduduk miskin yang ada di desa sebanyak 15,81 juta dengan indeks keparahan kemiskinannya sebesar 15,15. Sedangkan pada daerah kota jumlah penduduk miskin berjumlah 10,14 juta dengan indeks keparahan kemiskinannya sebesar 2,43[5]. Realitas kemiskinan yang lebih dominan desa ini bukan tanpa alasan. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya kesenjangan pembangunan yang terjadi antara daerah pedesaan dan perkotaan. Wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat pembangunan yang tinggi. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan lebih maju membuat wilayah kota digunakan sebagai kawasan industri dan ladang pencarian kerja. Sedangkan wilayah desa mulai tertinggal karena minimnya fasilitas dan infrastruktur yang tersedia. Dari realitas tersebut, perlu adanya sebuah solusi yang dapat menyelesaikan kesenjangan yang terjadi yaitu dengan merencanakan pembangunan *Smart Village*.

Konsep *Smart Village* merujuk pada suatu daerah pedesaan yang ingin membentuk beberapa peluang baru terkait dengan teknologi digital, jaringan, dan layanan baru dengan mengandalkan pengetahuan serta solusi inovatif yang lebih baik bagi daerah maupun masyarakatnya[11]. Namun, inovasi dari konsep *Smart Village* tidak dapat menjadi solusi sepenuhnya bagi seluruh desa yang ada di Indonesia. Selain dikarenakan kurangnya kesejahteraan masyarakat desa yang membuat akses terhadap teknologi menjadi terhambat, karakteristik masyarakat desa yang masih kental akan kesukuan dan lokalitas juga menjadi faktor penghambat penerapan *Smart Village*. Maka perlu adanya sebuah konsep baru, dimana pemanfaatan teknologi digital desa tidak hanya berfokus untuk memajukan kualitas hidup mereka namun juga mempertahankan bahkan memperkuat kelestarian budaya, struktur masyarakat, dan tatanan sosial yang mereka miliki[12].

Pada penerapan *Smart Village*, terdapat lima dimensi yang perlu diperhatikan yaitu *smart people*, *smart government*, *smart economy*, *smart promotion*, dan *smart environmental*[13]. Dibutuhkan masyarakat yang cerdas (*smart people*) yang dapat menggali potensi desanya dan memanfaatkan potensi tersebut untuk mengembangkan desanya. Pada kenyataannya, tingkat pendidikan di desa masih tergolong rendah baik secara fasilitas maupun akses yang dimiliki. Dibutuhkan masyarakat yang cerdas (*smart people*) yang dapat menggali potensi desanya dan memanfaatkan potensi tersebut untuk mengembangkan desanya. Pada kenyataannya, tingkat pendidikan di desa masih tergolong rendah baik secara fasilitas maupun akses yang dimiliki. Pada dimensi *smart government*, implementasi *Smart Village* pada penyelenggaraan pemerintahan dapat dibangun dalam bentuk pemanfaatan teknologi digital pada pelayanan publik[14]. Menurut data dari kementerian PDPT, hanya sebanyak 36.424 desa atau 49% dari desa yang ada di Indonesia telah mengunggah data desa ke Sistem Informasi Desa (SID)[15]. Sebanyak 51% desa belum menerapkan sistem digital untuk mempermudah pelayanan publik seperti SID. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem terintegrasi untuk pelayanan publik belum terlaksana secara optimal.

Penerapan *Smart Village* juga harus diimbangi pula dengan *smart economy*. Mayoritas penduduk desa berpenghasilan sebagai petani, dimana perlu adanya media yang disediakan pemerintah untuk mempromosikan potensi panen (*smart promotion*) mereka agar dapat menjual produk dengan cakupan pemasaran yang luas. Pada dimensi *smart environmental* mengacu pada pembentukan lingkungan yang bersih dan sehat. Kenyataannya, lingkungan desa yang bersih tidak diimbangi dengan media pengembangan diri masyarakat seperti taman bermain anak dan balai penyuluhan dengan fasilitas yang memadai guna sebagai wadah pengembangan kreativitas masyarakat.

### 3.2 Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Kesiapan Penerapan *Smart Village* di Indonesia

*Smart Village* merupakan konsep yang sangat tepat untuk diimplementasikan sebagai sistem pembangunan desa berkelanjutan. Namun pada faktanya desa-desa yang ada pada saat ini belum dapat memenuhi 5 dimensi yang harus diperhatikan dalam penerapan *Smart Village* ini. Selain hal tersebut masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan desa menuju *Smart Village* yaitu kesenjangan digital yang terjadi pada masyarakat terutama pada masyarakat desa.

Kesenjangan digital dapat dikatakan sebagai perbedaan dalam hal kesempatan akses dalam pemanfaatan telematika pada suatu daerah[16]. Pada saat ini kesenjangan digital diartikan sebagai kesenjangan yang didasarkan pada keahlian pengguna dan kualitas akses yang menunjukkan perbedaan antara suatu kelompok dalam penggunaan teknologi[17]. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa untuk mengukur kesenjangan digital adalah dengan mengukur Indeks Pembangunan TIK atau IP-TIK[18]. Indikator penyusun IP-TIK sendiri dibagi menjadi 3 subindeks yaitu subindeks akses dan infrastruktur yang mengukur kesiapan TIK dari sisi akses dan infrastuktur, kemudian subindeks penggunaan yang mengukur intensitas TIK dari penggunaan TIK, dan subindeks keahlian yang mengukur kemampuan atau keahlian yang diperlukan dalam penggunaan TIK. Namun pada penerapannya untuk mengukur pembangunan TIK adalah dengan melakukan pendekatan rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adanya pembangunan TIK. Pendekatan rumah tangga yang dilakukan adalah salah satunya dengan mengukur presentase rumah tangga dengan komputer.



Gambar 3. Diagram Kesenjangan antara daerah desa dan kota 2017-2018 sumber: BPS

Melalui pengukuran presentase rumah tangga dan komputer BPS mendapatkan hasil seperti pada Gambar 3. Dimana sangat terlihat kesenjangan penggunaan computer sebagai teknologi antara daerah desa dan kota. Hal tersebut ditunjukkan oleh presentase kepemilikan computer sebagai teknologi di daerah perkotaan berada diatas 25% selama 5 tahun sedangkan di daerah perdesaan presentasi kepemilikan komputer sebagai teknologi masih dibawah 10% [18]. Kemudian dikutip dari data *world bank* tahun 2019 pada masyarakat desa hanya 36%



masyarakat yang dapat memiliki akses terhadap teknologi sedangkan pada masyarakat perkotaan ada sebanyak 62% masyarakat yang memiliki akses teknologi[19]. Pada tahun 2018 disebutkan bahwa jumlah desa tertinggal di Indonesia adalah sebesar 17,96% dan jumlah desa berkembang adalah sebesar 74,49%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesenjangan digital pada masyarakat desa masih begitu kental terasa dan pemerataan perkembangan teknologi digital pada desa harus ditingkatkan.

Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan digital di Indonesia adalah ketidaksiapan masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur teknologi yang ada[20]. Masyarakat terutama masyarakat desa pada saat ini banyak yang belum mampu memanfaatkan teknologi yang ada secara optimal. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan, bahasa asing dan TIK, yang kemudian memunculkan kesenjangan digital merupakan sebagian permasalahan SDM yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini [21]. Terutama pada masyarakat pedesaan, kesenjangan digital masih sangat terasa adanya. Rata-rata kemampuan digital pada masyarakat yang tinggal pada daerah pedesaan masih kurang memadai untuk mendukung sektor pemerintahan dan pelayanan masyarakat hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo) Makassar tahun 2018, yang menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah (pemda) di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki andil atau peranan dalam sektor pemerintahan dan pelayanan masyarakat, masih memiliki kemampuan digital yang terbatas[22].

Pada dalam konsep *Smart Village* ini sangat diperlukan kemampuan penggunaan teknologi pada masyarakat agar teknologi dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan masyarakat dapat merasakan manfaat yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi tersebut. Kemampuan penggunaan teknologi oleh masyarakat ini akan sangat penting dipersiapkan karena dalam konsep *Smart Village* kebutuhan penggunaan teknologi adalah suatu hal yang penting. Semakin penting kebutuhan akan teknologi akan mempengaruhi tingkat kemampuan akan teknologi tersebut terhadap lingkungan kerjanya[23]. Dari pernyataan tersebut maka dapat diartikan dalam penerapan *Smart Village* yang memiliki kebutuhan akan teknologi yang tinggi mengharuskan masyarakat untuk memiliki kemampuan akan penggunaan teknologi yang tinggi juga pada masyarakat. Namun yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah kesenjangan digital yang masih terjadi pada masyarakat di Indonesia terutama pada masyarakat pedesaan. hal inilah yang harus diperhatikan sebelum penerapan konsep *Smart Village* pada desa- desa dan perlu dilakukan upaya mengatasi hal tersebut agar implementasi konsep *Smart Village* dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat sesuai dengan harapan.

### **3.3 Literasi Digital Sebagai Upaya Mengurangi Kesenjangan Digital**

Pembangunan yang dilakukan pada di Indonesia menjadi salah satu program pemerintah dalam upaya memakmurkan kehidupan masyarakat agar sejahtera dengan pembangunan yang stabil dan merata. Agar mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan strategi dan rencana pembangunan yang stabil dan juga berkelanjutan dengan jangka waktu yang panjang[24]. Dalam memulai pembangunan, dimulai dari unsur terkecil pada suatu wilayah yaitu, desa. Pada sektor pembangunan ini memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang atas program pemerintah dalam mempersiapkan sarana prasarana teknologi untuk transisi dari desa tradisional menuju *Smart Village* yang lebih modern[24]. Sebagai negara berkembang, banyak daerah pedesaan dengan jangkauan yang sulit dan terpelosok masih dimiliki Indonesia. Pada desa yang sedang mengubah diri ke arah *Smart Village* perlu mengalami proses pembenahan dan membutuhkan dukungan, serta pendampingan terhadap tantangan yang muncul dari adanya kesenjangan digital[25].

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyebutkan bahwa rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer pada tahun 2021 sejumlah 25,40% adalah

penduduk perkotaan dan pada penduduk pedesaan pada tahun 2021 berjumlah 8,82 % [26]. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada penguasaan dan kepemilikan Hasil dari data tersebut, menunjukkan adanya selisih perbedaan yang signifikan pada penguasaan dan kepemilikan teknologi komputer yang terjadi pada daerah pedesaan dan perkotaan. Maknanya, terjadi adanya kesenjangan digital dengan tingkat kepemilikan dan penguasaan komputer yang tinggi pada kalangan perkotaan daripada pedesaan. Hal ini juga dapat dilihat dari Survei Internet Indonesia 2023 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menurut penetrasi pengguna internet berdasarkan kategori *urban* dan *rural* bahwa sebesar 87,55% pengguna internet dari masyarakat perkotaan dan sebesar 79,79% dari masyarakat pedesaan [27]. Dilihat dari data yang ditunjukkan bahwa tingkat penetrasi pengguna internet pada masyarakat perkotaan lebih tinggi 7,76 % daripada masyarakat pedesaan. Dari kedua data yang ditunjukkan ini dapat diungkapkan bahwa masih rendahnya akses ke teknologi dan tersedianya layanan internet. Hal tersebut dapat dibenahi dengan mulai penyediaan sarana infrastruktur internet agar sistem yang ada dapat berjalan dan secara optimal aparat pemerintah desa serta masyarakat dapat menggunakannya.

Akan tetapi, keberadaan internet yang telah ada pada desa yang siap melakukan pembenahan juga memerlukan literasi digital karena tersedianya internet tidak hanya sebatas pada perangkat dan website saja tetapi juga penggunaannya agar lebih optimal [28]. Berdasarkan hasil survei Literasi Digital Indonesia 2021, 49,8% tingkat literasi digital daerah pedesaan lebih rendah sebesar 2,7% dari perkotaan yang tingkat literasi digitalnya sebesar 52,5% [29]. Data tersebut dapat membuktikan bahwa pada kalangan penduduk di pedesaan menghadapi adanya tantangan yang lebih besar dalam menghadapi pengetahuan dan keterampilan mengenai teknologi digital. Dapat digambarkan adanya perbedaan akses dan pengetahuan teknologi pada masyarakat perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi terjadinya kesenjangan digital ini dengan meningkatkan literasi digital.

Literasi digital merupakan suatu kemampuan dalam menemukan, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif, dari berbagai sumber media digital. Dalam literasi digital dibutuhkan kemampuan dari seseorang untuk berpikir kritis, pengetahuan tentang menerima norma perilaku dalam interaksi secara online, dan pemahaman tentang teknologi digital yang menimbulkan masalah sosial secara umum [30]. Literasi digital ini dapat membuat masyarakat mampu untuk menggunakan teknologi bagi kehidupan mereka agar lebih mudah, termasuk untuk meningkatkan kemampuan dalam memperbaiki ekonomi. Lalu, dengan peningkatan literasi digital diharapkan mampu mempromosikan akses yang adil terhadap teknologi bagi seluruh lapisan di masyarakat [6]. Terdapat berbagai hal yang dilakukan untuk pemberian literasi digital ini kepada masyarakat desa.

Pertama, dengan melakukan program pelatihan TIK yang diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial daerah. Program ini dapat membuat masyarakat di desa dapat lebih mengenal dan memanfaatkan teknologi digital dengan optimal dan efektif, seperti halnya mengakses informasi, melakukan komunikasi dan mencari peluang dalam usaha ekonomi. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat desa dalam menggunakan teknologi digital dan membangun peluang untuk berkembang [6]. Dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk menggunakan berbagai perangkat TIK diharapkan dapat mempercepat arus informasi dan komunikasi antara desa tertinggal dengan mitra daerah dan kota agar tidak terjadi ketimpangan [30]. Kedua, melakukan pendampingan dan pembinaan mengenai internet yang aman, sehat dan positif, memungkinkan masyarakat menggunakan media digital sebagai sarana untuk melakukan komunikasi, berkreasi dan menggunakan informasi secara pintar dan bijak dalam kehidupan sehari-hari [3]. Pembinaan tentang penggunaan internet dalam menciptakan dan mengelola media sosial diharapkan masyarakat desa dapat melakukan kegiatan berdagang secara online dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kapasitas

penjualan serta ekonomi mereka[31]. Selain itu, pendampingan perlu dilakukan terutama pada anak dan remaja agar mampu memilih informasi secara cerdas yang tersebar luas di internet. Ketiga, pembentukan dan pengembangan sistem informasi desa. Selain masyarakat desa, pemerintah desa juga perlu meningkatkan literasi digital dalam memanfaatkan internet pada sistem informasi desa karena peningkatan literasi memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam informasi yang tersebar luas tentang informasi penting apa saja yang harus diketahui, baik masyarakat desa maupun luar desa melalui sistem informasi desa[28].

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

*Smart Village* merupakan solusi guna menciptakan sistem pembangunan desa berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia dimana tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dari pada daerah perkotaan. Kemudian yang lebih penting adalah kesenjangan digital yang masih kental terasa pada daerah pedesaan. Hal tersebut mengakibatkan ketidaksiapan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi yang ada secara optimal untuk penerapan *Smart Village* di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan guna mengurangi kesenjangan digital pada penerapan *Smart Village* dapat dimulai dengan meningkatkan literasi digital pada masyarakat desa. Dengan pengembangan literasi digital, masyarakat diharapkan mampu menggunakan teknologi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkat ekonomi dan kualitas hidup mereka menjadi lebih maju. Menumbuhkan literasi digital dapat dilakukan dengan melaksanakan program pelatihan TIK dengan harapan dapat memupuk kepercayaan diri dan kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Selain itu, perlu juga dilakukan pendampingan dan pembinaan mengenai internet sehat dan internet positif agar masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk kegiatan sehari-hari seperti berjualan dengan harapan meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Pembentukan dan pengembangan sistem informasi desa oleh pemerintah desa juga penting guna mengintegrasikan sistem pelayanan publik agar berjalan lebih efektif dan efisien.

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang dapat menghalangi atau menghambat penerapan *Smart Village* di Indonesia. Kemudian diharapkan peneliti selanjutnya juga dapat memberikan upaya lain dalam mengatasi kesenjangan digital pada daerah pedesaan di Indonesia yang benar-benar dapat terlaksana sehingga penerapan konsep *Smart Village* dapat berjalan dengan sukses hingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

#### 5. DAFTAR RUJUKAN

- [1] H. I. Bahirah, "Smart Village sebagai Jawaban Masa Depan," *Translitera*, vol. 11, no. 2, pp. 23–35, 2022.
- [2] S. J. Sukri, May Valzon, Salamun, Muhammad Yazid, Kenepri, "EDUKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM KONSEP SMART VILLAGE DI DESA SEI LEMBU MAKMUR KABUPATEN KAMPAR," vol. 5, no. 3, pp. 155–164, 2022.
- [3] A. Qashlim, A. Asis, and A. Andriani, "Internet Masuk Desa: Sebuah Upaya Literasi Digital Untuk Menciptakan Masyarakat Melek Teknologi Pada Desa Piriang Kecamatan Tutar," *SIPISSANGNGI J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, p. 61, 2021, doi: 10.35329/sipissangngi.v1i1.1986.
- [4] R. D. Tia Subekti, "Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang," *J. Public Adm. Local Gov.*, vol. 3, no. 1, pp. 18–28, 2019.
- [5] H. A. Huda, U. Suwaryo, and N. I. Sagita, "PENGEMBANGAN DESA BERBASIS



- SMART VILLAGE (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang) Hafny,” *Moderat J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 6, no. 3, p. 450, 2020.
- [6] A. A. J. Arsyad, L. Sulisty, W. Rahayu, and E. Fatmawati, “Upaya Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui Program Pelatihan Komputer Di Desa Terpencil,” vol. 4, no. 1, pp. 654–661, 2023, [Online]. Available: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/12430>
- [7] R. D. Nasution, “Effect of Digital Divide on Rural Development,” *J. Penelit. Komun. dan Opini Publik*, vol. 20, no. 1, pp. 31–44, 2016, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/123364-ID-none.pdf>
- [8] Tim Redaksi VOI, “Penyebab Kemiskinan, Definisi, dan Data Orang Miskin di Indonesia,” <https://voi.id/>, 2021. <https://voi.id/ekonomi/37805/penyebab-kemiskinan-definisi-dan-data-orang-miskin-di-indonesia#:~:text=Beberapa Faktor-Faktor Kemiskinan di Indonesia 1 1. Pandemi,... 4 4. Naiknya Harga Kebutuhan Pokok>
- [9] H. M. M.Sc., “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018,” *Ber. Resmi Stat. Badaan Pus. Stat.*, no. July, pp. 1–8, 2018, [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- [10] T. H. P. Sasmita, “<https://www.kompasiana.com/putrisasmita/5927dde982afbda25e59a2ca/faktor-penyebab-kemiskinan-di-indonesia>,” <https://www.kompasiana.com/>, 2017. <https://www.kompasiana.com/putrisasmita/5927dde982afbda25e59a2ca/faktor-penyebab-kemiskinan-di-indonesia>
- [11] K. Hayati, “Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Sinergisitas Dengan Bumdes Dan Desa Pintar (Smart Village),” *J. Bisnis dan Manaj.*, vol. 17, no. 3, pp. 170–182, 2021.
- [12] F. Lubis and Yusniah, *KONSEP IMPLEMENTASI SMART VILLAGE*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA Melong Asih Regency B40 [www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id), 2022.
- [13] Y. W. Ratih Waseso, “PENERAPAN DESAIN ICONIX PROCESS DALAM,” no. September, pp. 10–11, 2022.
- [14] R. Musfikar, U. Rizqina, and Y. Yusran, “Analisis Kesiapan Desa Menuju Smart Village Pada Kecamatan Indrapuri Aceh Besar,” *J. Infomedia Tek. ...*, vol. 7, no. 2, pp. 1–3, 2022, [Online]. Available: <http://e-jurnal.pnl.ac.id/infomedia/article/view/3025%0Ahttp://e-jurnal.pnl.ac.id/infomedia/article/download/3025/2742>
- [15] A. H. Muzaqi and B. Tyasotyningarum, “Village Community Empowerment Model in Smart Village Perspective (Study on Village Communities in Jombang Regency),” *JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik)*, vol. 10, no. 1, pp. 42–53, 2022, doi: 10.21070/jkmp.v10i1.1683.
- [16] S. Ariyanti, “Studi Pengukuran Digital Divide di Indonesia,” *Bul. Pos dan Telekomun.*, vol. 11, no. 4, p. 281, 2015, doi: 10.17933/bpostel.2013.110402.
- [17] R. Jayanthi and A. Dinaseviani, “Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia selama Pandemi COVID-19,” *J. Ilmu Pengetah. dan Teknol. Komun.*, vol. 24, no. 2, pp. 187–200, 2022.
- [18] T. S. Rima Untari, Atika Nashirah Hasyiyati, Vera Citra Wulandari, Adam Luthfi Kusumatrisna, Adriyani Syakilah, *INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2021*. BPS RI, 2021.
- [19] F. M. Putra, “Ketimpangan Digitalisasi Antara Daerah Perdesaan dan Perkotaan,” <https://digitalbisa.id/>, 2021. <https://digitalbisa.id/artikel/ketimpangan-digitalisasi-antara-daerah-perdesaan-dan-perkotaan-0GdhX>
- [20] M. Liyanthy, A. A. Nurcahyo, and R. D. Sakam, “Pengabdian Kepada Masyarakat

- Pelatihan Pemanfaatan Rumah Pintar Oleh Masyarakat Dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan Digital Desa Warga Saluyu 2017,” *Charity*, vol. 1, no. 1, p. 142, 2018, doi: 10.25124/charity.v1i01.1587.
- [21] Y. D. Hadiyat, “Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi),” *Pekommas*, vol. 17, no. 2, pp. 81–90, 2014.
- [22] D. F. Dhahir, “Rancangan Strategi Kominfo Dalam Upaya Mengurangi Kesenjangan Digital,” *J. PIKOM (Penelitian Komun. dan Pembangunan)*, vol. 20, no. 2, p. 71, 2019, doi: 10.31346/jpikom.v20i2.2235.
- [23] I. P. Windasari, K. Surendro, and A. K. Digital, “Pengukuran Kesenjangan Digital di Institusi Pemerintah Daerah ( Studi Kasus : Pemerintah Kota Semarang ),” *J. Sist. Komput.*, vol. 1, no. 2, pp. 71–76, 2014.
- [24] A. V. Vitianingsih, “Regional Development Planning Strategy Through the Digital Village Program to Realize the Welfare of Rural Communities Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Program Desa Digital untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan,” vol. 2, no. 1, pp. 45–58, 2023.
- [25] V. P. Sari, “PENDIRIAN POJOK DIGITAL DALAM UPAYA MENGATASI TANTANGAN KESENJANGAN DIGITAL DI DESA JATIHURIP,” *Dharmakarya J. Apl. Ipteks untuk Masy.*, vol. 11, no. 4, pp. 1–23, 2022.
- [26] A. N. H. Sri Sutarsih, Vera Citra Wulandari, Rima Untari, Adam Luthfi Kusumatriana, *STATISTIK TELEKOMUNIKASI INDONESIA 2021*. Badan Pusat Statistik, 2021.
- [27] APJII, “Press Conference Survei Internet Indonesia 2023 Tahap 1,” <https://survei.apjii.or.id/>, 2023. <https://survei.apjii.or.id/survei/>
- [28] R. D. Putra and M. Rosit, “Peningkatan Literasi Internet dan Penguatan Sistem Informasi Desa Bagi Perangkat Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor,” *Cover. J. Strateg. Commun.*, vol. 13, no. 1, pp. 26–37, 2022, doi: 10.35814/coverage.v13i1.3518.
- [29] F. R. Humaira, “Indeks Literasi Digital Berdasarkan Wilayah di Indonesia,” <https://databoks.katadata.co.id/>, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/12/indeks-literasi-digital-berdasarkan-wilayah-di-indonesia>
- [30] A. Kurniawan, A. Octa Indarso, W. Yoga Sembada, and K. Anwar, “Pemberdayaan Literasi Digital di Desa Waringin Kurung, Cimanggu Pandeglang,” *Indones. J. Soc. Engagem.*, vol. 2, no. 2, pp. 91–105, 2021, doi: 10.33753/ijse.v2i2.35.
- [31] R. Witarsa, N. Nurmalina, and M. Mufarizuddin, “Penyuluhan Literasi Digital Desa Ridan Permai,” *Community Dev. J. J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 3, pp. 1104–1111, 2022, doi: 10.31004/cdj.v2i3.2962.